

SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA
TEBING BREKSI DI KALURAHAN SAMBIREJO KAPANEWON
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN



NAMA : HABIB ABDUL SUBHIAKTI MANSUR

NIM : 18520145

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA

TEBING BREKSI DI KALURAHAN SAMBIREJO KAPANEWON

PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



Disusun Oleh:

HABIB ABDUL SUBHIAKTI MANSUR

NIM: 18520145

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

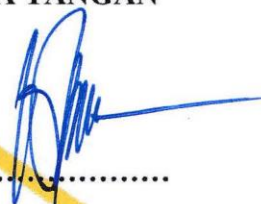


Hari : Jumat

Tanggal : 04 Agustus 2023

Jam : 10:00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Analius Giawa, S.IP., Msi</u> <u>Ketua Penguji/Pembimbing</u>	
<u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> <u>Penguji Samping I</u>	
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> <u>Penguji Samping II</u>	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Abdul Subhiakti Mansur

NIM : 18520145

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI DI KALURAHAN SAMBIREJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



(Habib Abdul Subhiakti Mnasur)

NIM: 18520145

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan karena itu bila kau telah selesai

(mengerjakan yang lain) dan kepada tuhan, berharaplah

(QS Al Insyirah : 6-8)

Kebiasaan belum tentu benar, tetapi kebenaran harus dibiasakan

(Habib Abdul Subhiakti Mansur)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtua saya yang terkasih dan tercinta, Bapak Mansur dan Ibu Rembufrida, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat serta nasehat kepada saya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan bangga dengan pencapaian saya saat ini.
3. Keluarga tersayang saya, yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat yaitu saudara saya Yuni Mansur, Rati Pratiwi, serta adik tersayang saya Mega Ulfa sarasmita.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Analius Giawa S.IP., MSi. terima kasih telah memberikan banyak ilmu kepada saya. Dengan segala kemampuan serta kebaikan hati Bapak telah sabar membimbing, mengajarkan dan mengarahkan saya. Semoga Bapak diberikan kesehatan lahir dan batin dan semoga Tuhan memberikan kebahagiaan hidup.
5. Untuk teman-teman saya, Amran Wahyudi, Abdul Rahman, Irwan Bono, Rahman Haku, Titin Nurliyanti dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terima kasih sudah bersama-sama dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan semangat serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI DI KALURAHAN SAMBIREJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.IP., MSi. Selaku dosen pembimbing yang baik serta sabar dalam membimbing, mengarahkan dan mengajarkan penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Firdaus S.IP., MA. selaku dosen Wali STPMD “APMD”.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”. Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
6. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Tempat saya mengenyam pendidikan tetap jaya selalu.
7. Seluruh staf dan karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta.

8. Bapak Wahyu Nugroho, S.E selaku Lurah Kalurahan Sambirejo tempat peneliti melakukan penelitian.
9. Bapak Mujimin S.Sos selaku Carik Kalurahan Sambirejo yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Mohammed Halie M.SH.selaku Humas Pengelola Taman Tebing Breksi yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2018 khususnya.
12. Teman seperjuangan, Pakomeus Adi dan Noven Cristian. Terimakasih telah mendukung dan menyemangati selama penyelesaian skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini bertahan dan berjuang serta semangat untuk mencapai cita-cita sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata ijin penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan penulis selama proses perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua.

Yogyakarta, 22 Juli 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Literatur Review	8
G. Kerangka Konsep	13
1. Pengertian Partisipasi	13
2. Pemerintah Desa.....	21

3.	Konsep objek wisata.....	26
4.	Pengelolaan dan Manfaat Objek Wisata	27
H.	Metode Penelitian.....	31
1.	Jenis Penelitian.....	31
2.	Unit Analisis.....	32
3.	Teknik Pengumpulan Data	33
4.	Jenis dan Sumber Data	34
5.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB II PROFIL KALURAHAN SAMBIREJO		35
A.	Sejarah Kalurahan Sambirejo.....	35
B.	Visi dan Misi	36
C.	Struktur Organisasi	37
D.	Keadaan Geografis	39
E.	Keadaan Demografis.....	42
F.	Keadaan Sosial Budaya	47
G.	Keadaan Ekonomi	48
H.	Keadaan Sarana dan Prasarana	51
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI.....		53
A.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tebing Breksi.....	53
1.	Kontribusi Masyarakat Dalam Forum Pengambilan Keputusan.....	53

2. Manfaat Yang diperoleh Masyarakat62
3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Mengawasi Kegiatan di Objek Wisata Tebing Breksi.

67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informen	32
Tabel 2.1 pembagian wilayah Kalurahan Sambirejo	40
Tabel 2.2 luas wilayah berdasarkan penggunaan.....	41
Tabel 2.3 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	43
Tabel 2.4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan jenis kelamin.....	43
Tabel 2.5 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	44
Tabel 2.6 Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 2.7 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	46
Tabel 2.8 jumlah penduduk bekerja berdasarkan umur/usia kerja	48
Tabel 2.9 jumlah pengangguran berdasarkan kelompok umur	49
Tabel 2.10 jumlah tahapan keluarga sejahtera	50
Tabel 2.11 Sarana dan prasarana keagamaan	51
Tabel 2.12 Sarana dan prasarana Pendidikan	52
Tabel 2.13 Sarana dan prasarana Kesehatan.....	52
Tabel 3.1 sistem bagi hasil unit-unit usaha BUM Kal Sambimuliyo	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 bagan struktur organisasi Kalurahan Sambirejo	37
Gambar 2.2 bagan kepengurusan Tebing Breksi	39
Gambar 2.3 batas wilayah Kalurahan Sambirejo.....	40
Gambar 2.4 data penduduk	42
Gambar 3.1 loket tiket objek wisata Tebing Breksi.....	57
Gambar 3.2 kondisi jalan menuju objek wisata Tebing Breksi	66
Gambar 3.3 rencana anggaran dan biaya	69
Gambar 3.4 kondisi Tebing Breksi tahun 2016	70
Gambar 3.5 kondisi Tebing Breksi sekarang	70
Gambar 3.6 kondisi jalan masuk dan keluar di objek wisata Tebing Breksi.....	71

INTISARI

Kalurahan Sambirejo merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi, penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi diantaranya partisipasi masyarakat pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif. pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sumber data berdasarkan data primer seperti hasil observasi dan wawancara dan data sekunder seperti catatan-catatan atau dokumen-dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi ialah 1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih belum maksimal karena dalam musyawarah yang dilakukan belum melibatkan elemen-elemen masyarakat secara keseluruhan yang dilibatkan hanya perwakilan saja dari beberapa masyarakat. 2) partisipasi masyarakat dalam pengawasan sudah cukup maksimal karena para pengurus atau pekerja yang terlibat langsung dalam mengelola objek wisata Tebing Breksi merupakan masyarakat Kalurahan itu sendiri sehingga masyarakat yang menjadi pengurus dan yang bekerja di Tebing Breksi turut terlibat langsung mengawasi setiap program atau pembangunan yang ada di objek wisata Tebing Breksi. Akan tetapi masih ada kurangnya partisipasi masyarakat dari masyarakat di luar masyarakat yang tergabung langsung dengan objek wisata Tebing Breksi yang tidak tahu program maupun pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di dalam wilayah objek wisata Tebing Breksi. 3) partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat masih belum maksimal di rasakan oleh seluruh masyarakat Kalurahan Sambirejo karena masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhannya sehingga belum merasakan peningkatan kesejahteraan masyarakat semenjak adanya objek wisata Tebing Breksi tersebut.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Objek Wisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menyimpan banyak potensi alam dari sektor pariwisata. Seiring berjalannya perkembangan zaman, bidang pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, termasuk salah satu pemasukan devisa negara. Sektor pariwisata juga dikembangkan atau di kelola oleh pemerintah bukan hanya untuk dilestarikan akan tetapi guna meningkatkan ekonomi wilayah tersebut. Kekayaan alam yang melimpah di Indonesia seperti Pantai, Danau, Sungai atau Bekas Tambang mampu menarik minat masyarakat untuk bagaimana mengelolah tempat tersebut menjadi tempat wisata. Bahkan budaya atau *culture* masyarakat tersebut juga akan berpotensi menjadi daya tarik tersendiri wisata yang berbasis dengan *culture*. Keanekaragaman alam yang dimiliki Indonesia menjadi sumber daya keparawisatawan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional atau peningkatan pendapatan ekonomi diwilayah tersebut. Dengan adanya berbagai macam karakteristik alam maka untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus berlandaskan kepada konsep perlindungan alam, yaitu ekowisata, geowisata dan taman bumi.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak ditemukan situs-situs wisata yang berlandaskan kepada konsep perlindungan alam, karena Yogyakarta juga salah daerah yang menyimpan kekayaan destinasi wisata yang beragam dan unik. Bahkan selain itu yogyakarta juga dijuluki kota wisata, kota pelajar, dan kota budaya. Pesona alam, budaya hingga sosial masyarakatnya juga di optimalkan dengan baik sebagai sumber potensi keparawisatawan dalam artian masyarakatnya Yogyakarta juga mampu mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat dijadikan

sebagai wisata edukasi, alam atau bentuk lainnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang berasal dari pemerintah pusat.

Desa memiliki peranan dalam mengurus dan mengatur sesuai amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Adanya undang-undang tersebut melahirkan suatu desa dalam pembangunan nasional yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat menuju suatu desa yang mandiri. Pengembangan ekonomi desa tidak hanya berlandaskan pada penempatan modal. Karena produksi yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) lokal wajib dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah kepemilikan para anggota masyarakat (Wijaya, 2018:6). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi desa menjadi bagian yang strategis dalam upaya pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Desa adalah unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pada dasarnya setiap desa memiliki potensi dan karakteristiknya masing-masing. Sementara untuk meningkatkan potensi tersebut dibutuhkan peran pemerintah desa dan masyarakat sekitar untuk menunjang keberhasilan desa dalam berbagai inovasinya. Menurut Muluk (dalam Pratiwi, 2016:22). Inovasi yaitu mengubah sesuatu hal menjadi perubahan yang baru. Dalam menunjang keberhasilan Desa, terobosan merupakan suatu keharusan untuk mendorong suatu pencapaian dalam jangka panjang pada suatu desa. Sehingga bisa dikembangkan di kemudian hari oleh masyarakat sekeliling agar meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat bagi kesejahteraan perekonomian.

Di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman terdapat salah satu destinasi wisata buatan bekas penambangan Bukit Kapur yang dimanfaatkan untuk dijadikan objek wisata yaitu Objek Wisata Tebing Breksi. Bentang alam buatan Breksi merupakan endapan dari abu vulkanik Gunung Api Purba Nglanggeran. Batu-batuan breksi dulunya dijadikan sebagai tempat penambangan oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi banyak terjadinya pengeksploitasian alam yang dilakukan secara berlebihan menyebabkan terkikisnya fungsi batuan Breksi, sehingga penambangan yang dilakukan oleh masyarakat diberhentikan oleh Dinas Parawisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Taman Tebing Breksi ini memiliki daya tarik tersendiri dari setiap pahatan dibatuannya, sehingga Taman Tebing Breksi yang dulunya hanya bekas tambang maka pemerintah setempat khususnya Dinas Parawisata bersosialisasi untuk bagaimana menyadarkan masyarakat agar bisa mengembangkan serta mengelola potensi dari batuan Breksi.

Pelaksanaan pengembangan destinasi Taman Tebing Breksi telah menerapkan konsep perlindungan dan pemanfaatan alam dan lingkungan hidup. Dengan adanya kelompok sadar wisata atau yang biasa dikenal dengan Pokdarwis diharapkan pengelolaan tempat wisata bisa dikembangkan dengan sebaik mungkin dan bisa melestarikan warisan geologi ini. Selain itu dengan didampingi oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu untuk mengelolah Taman Tebing Breksi dan bekerja sama dengan Perangkat Desa diharapkan Perangkat Desa mampu menggerakkan masyarakat sadar akan potensi yang dimiliki oleh Taman Tebing Breksi. Taman Tebing Breksi ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan geologi atau situs geologi. Penetapan sebagai warisan geologi atau situs geologi bukan tanpa dasar semata melainkan merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Taman Tebing Breksi merupakan situs peninggalan bebatuan dengan riwayat geologi yang sudah berusia berpuluh tahun lamanya (Pumbudi 2018:5). Penelitian tersebut juga diperkuat

dengan surat Keputusan Badan Geologi No. 1157.K/73BLG/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Tentang Penentuan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pada tahun 2017 Taman Tebing Breksi masuk ke ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) acara ini merupakan kegiatan untuk mengapresiasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Pada acara tersebut Taman Tebing Breksi mendapat juara pertama dalam kategori Tujuan Wisata Baru Terpopuler. Hingga saat ini Taman Tebing Breksi masih melakukan inovasi untuk terus mengembangkan wisatanya, hal itu dapat dilihat dari bertambahnya fasilitas dan atraksi wisata dan minat pengunjung yang semakin hari mengalami peningkatan. Dan tentunya semua itu karena sinergi dari Pemerintah Desa Sambirejo, pengelola dan juga masyarakat yang memiliki kesadaran akan wisata yang tinggi.

Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2012 Pasal (6) Tentang Pembangunan Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilakukan dan dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Sedangkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2015 Pasal 1 Ayat (7) Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Tujuan pengelolaan kekayaan milik Desa ini sejalan dengan regulasi sebelumnya yang tertuang dalam Permendagri No. 4 Tahun 2007 dimana pemerintah desa memperoleh mandat untuk mengelola kekayaan Desa

yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan peneyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan aset Desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset Desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengapusan, pemindah-tangan, penatausahaan, penilaiaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sekalipun mendapat mandat pengelolaan, Pemerintah Desa tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang.

Salah satu hal yang perlu dikelola oleh Pemerintah Desa adalah objek wisata. Objek wisata ini salah satu hal yang penting bagi Pemerintah Desa untuk kemajuan dan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Pemerintah Desa bisa mengelola objek wisatanya dengan baik, maka kesejahteraan dan kemandirian Desa itu muncul ketika Pemerintah Desa itu dapat mengelola objek wisatanya dengan baik. Objek wisata ini sangat penting dikelola oleh Pemerintah Desa, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan juga masyarakat luas.

Pengelolaan dan Pemanfaatan objek wisata perlu didukung dengan manajemen yang solid, fleksibel dan serta dinamis. Pemerintah Desa dalam mengelola objek wisata harus melibatkan tokoh desa masyarakat setempat serta berbasis pada azas yang berlaku, keterlibtan masyrakat lokal merupakan unsur utama dalam pemanfaatan dan pengelolaam objek wisata untuk mengambil bagian aktif dalam semua proses, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, termasuk didalamnya pengusahaan kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan. Dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata ini Pemerintah Desa mendapatkan mandat dalam pengelolaan agar Pemerintah Desa tidak memanfaatkannya untuk kepentingan segelintir orang. Dalam pengelolaan objek wisata selama ini partisipasi masyarakat belum sepenuhnya maksimal, karena masih banyak masyarakat yang kurang terlibat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu

dengan adanya potensi sumber daya alam yang dapat mereka kelola untuk menambah perekonomian mereka. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa informan saat melakukan observasi masih kurangnya manfaat yang dirasakan masyarakat Kalurahan Sambirejo. Manfaat adanya objek wisata Tebing Breksi belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalurahan Sambirejo.

Di lokasi Taman Tebing Breksi juga masih ada proses pembangunan pengembangan yang belum maksimal. Dengan adanya pengembangan pembangunan untuk menunjang sumber daya dalam artian untuk meningkatkan fasilitas wisata diharapkan peluang wisata ini menjadi peluang masyarakat dalam pengembangan potensi alam warisan geologi. Dengan adanya peningkatan tidak bisa dipungkiri akan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Taman Tebing Breksi. Akan tetapi bila ditelaah lebih dalam lagi sistem pengelolaan Taman Tebing Breksi ini masih tahap proses pengembangan. Tentu dari setiap keberhasilan sekarang pastinya memiliki tolak ukur penilaian baik itu secara fasilitas mau pelayanan yang mengelola Taman Tebing Breksi.

Sehingga yang menjadi permasalahan di Kalurahan Sambirejo bila kita menelaah lebih jauh yaitu kurangnya partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, dengan mengkesampingkan Keterlibatan atau Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata breksi Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Perambanan, Kabupaten Sleman. Karena seperti yang kita ketahui dalam UU Desa seluas-luasnya memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Desa untuk menjalankan roda pemerintahannya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada beberapa indikator di bawah ini yang membatasi latar belakang di atas yaitu:

1. Kontribusi masyarakat pada forum pengambilan keputusan dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi.
2. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari keberadaan objek wisata Tebing Breksi.
3. Keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan di objek wisata Tebing Breksi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka peneliti ingin lebih merumuskan dalam bingkai masalah yaitu Bagaimanakah “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Tebing Breksi Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mendeskripsikan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman.
3. Menguraikan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan pengelolaan objek wisata breksi di Kelurahan Sambirejo, Kapamewon Prambanan Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan keilmuan kepada masyarakat Desa dan referensi bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui deskripsi hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian sebagai evaluasi yang dijadikan rujukan sebagai bahan masukan untuk Kelurahan Sambirejo sebagai aktor dalam kemandirian dan kesejahteraan desa, agar masyarakat terlibat dalam pengelolaan objek wisata yang efektif.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana serta untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sehingga menambah wawasan dalam berfikir.

4. Manfaat bagi pemerintah desa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan objek wisata di Kelurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

F. Literatur Review

Telah banyak pembahasan mengenai kiprah Pemerintah Desa dalam mengelola desa wisata, oleh karena itu untuk mengetahui informasi terbaru dari temuan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, maka peneliti perlu menyajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki fokus perhatian yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang ditulis dalam jurnal dan skripsi diantaranya sebagai berikut:

1. Ristarnado (Juni 2019). “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata” Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah. Dengan hasil penelitian yaitu kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan desa Tanjung Alam dalam mengembangkan objek wisata Telaga Biru adalah penyediaan sarana dan prasarana atau faktor fasilitas dan

infrastruktur yaitu jalan utama menuju objek wisata Telaga Biru. Fasilitas dan infrastruktur menuju objek wisata Telaga biru termasuk ke dalam Accessibility atau aksesibilitas, seperti akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan bagian aspek pendukung kelancaran menuju objek wisata tersebut.

garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1081374&val=16342&title=Strategi%20pemerintahan%20desa%20dalam%20mengembangkan%20pariwisata

2. Siam (Juli, 2015) Peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lingga Dalam Pengembangan Objek Wisata”. Jurnal ipteks terapan. Dengan hasil penelitian bahwasanya peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata berpengaruh cukup besar terhadap majunya pariwisata menjadi salah satu industri penunjang perekonomian di suatu negara. Dalam bidang kepariwisataan pemerintah bertugas untuk mengembangkan wisata dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat serta pembangunan Nasional. Disisi lain pariwisata di sebagian besar negara juga dapat dijadikan sebagai ikon dan menjadi penerimaan terbesar untuk suatu negara.
https://www.researchgate.net/publication/312350912_Peranan_Dinas_Kebudayaan_dan_Pariwisata_Kabupaten_Lingga_dalam_Pengembangan_Objek_Wisata
3. Ian Aji Hermawan (Mei 2015) Peran Serta Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Melalui Kebijakan Desa Wisata” dengan hasil penelitian bahwasanya pemerintah daerah harus melakukan strategi pengelolaan dengan memperbaiki infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana di Museum Karst sehingga dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Upaya pengembangannya, seperti menambah fasilitas di sekitar museum, menanam jenis-jenis bunga atau membuat taman di sekitar museum agar menambah suasana yang asri. *https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6557-Full_Text.pdf*

4. Nopi Puspita Sari (2019) Evaluasi Pengelolaan Geowisata Pada Fasilitas Dan Atraksi Wisata Di Taman Tebing Breksi”. Dengan hasil penelitian bahwa perlu adanya evaluasi dalam meningkatkan fasilitas dan atraksi wisata di Taman Tebing Breksi. dengan begitu pengelola dapat mengukur menilai hasil pengelolaan yang sudah dicapai dalam hal pengelolaan fasilitas dan atraksi wisata. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34543/>
5. Agung Pambudi (2018) Revitalisasi Sumber daya Alam Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata: Studi Di Taman Tebing Breksi Desa Sambirejo, Prambanan, Sleman” Skripsi. Dengan hasil penelitian bahwasanya pengelolaan Taman Tebing Breksi bermula pasca di resmikannya kawasan tersebut sebagai Geo Heritage, yang sebelumnya merupakan kawasan penambangan batu. Kemudian para inisiator bergerak untuk melakukan upaya sosialisasi kepada para penambang agar beralih ke sektor pariwisata. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30783/>
6. Agung Adirasputra (2018) Peran Kelompok Sadar Wisata Tlatar Seneng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Skripsi „Studi Kasus pada Objek Wisata Taman Tebing Breksi di Dusun Ngelngkong Sambirejo Prambanan Sleman Yogyakarta)”. Dengan hasil penelitian bahwa dalam menghadapi permasalahan alih fungsi tebing breksi kelompok sadar wisata Tlatar Seneng berperan sebagai aktor yang menyelesaikan dan melakukan adaptasi dengan cara merubah pola pikir masyarakat. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32916/>
7. Baskoro (2020) “Analisis Pengembangan Benteng Van Der Wijck Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pengelolaan Benteng Van Der Wijck belum dilakukan secara maksimal, atraksi yang disediakan kurang menarik minat wisatawan dan fasilitas yang disediakan belum bisa memenuhi kebutuhan wisatawan, sehingga tingkat kunjungan wisatawan tidak mengalami kenaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Atraksi wisata di Benteng Van Der Wijck menjadi satu – satunya wisata budaya yang ada di Kabupaten Kebumen, menjadi unggulan karena memiliki nilai sejarah yang berbentuk bangunan yang unik.
- b. Aksesibilitas menuju Benteng Van Der Wijck sangat mudah diakses karena jalan yang bagus, lokasi yang strategis.
- c. Amenitas yang lengkap untuk menunjang kegiatan wisatawan Dalam penelitian ini pengelola Museum Benteng Van Der Wijck dan Dinas Pariwisata lebih memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal dan keaslian bentuk bangunan benteng agar bisa menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Kebumen.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/22/160000169/benteng-van-der-wijck-dulunya-bernama-fort-cochius>

8. Purba (2019) Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Objek Wisata Makam Papan Tinggi Kabupaten Tapanuli Tengah. Masyarakat lokal masih memiliki hambatan yang harus diselesaikan secepatnya, dimana hambatan tersebut seperti kurangnya sadar wisata masyarakat lokal, kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, kurangnya kerja sama dengan pihak travel, minimnya kreativitas untuk membuat atraksi wisata atau kegiatan outbound, dan kurangnya kreativitas masyarakat untuk membuat souvenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat lokal dalam peningkatan kunjungan wisatawan telah melakukan strategi yang sangat membantu, adapun strategi tersebut adalah pemeliharaan lingkungan, meletakkan tempat pembuangan sampah di titik tertentu, perbaikan sarana dan fasilitas, pembuatan papan petunjuk dan informasi, pembuatan toilet umum, pembuatan lahan parkir, pembuatan tempat duduk atau berteduh, pembuatan kantin, pembuatan gapura

atau baliho dan melakukan promosi.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6127?show=full>

9. Imbiri (2015) Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja di Kabupaten Manokwari. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan kawasan hutan Taman Wisata Alam Kabupaten Manokwari. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan konservasi taman wisata alam gunung meja yang perlu dilakukan adalah:
- a. Pemerintah harus memiliki kemauan politik dan kebijakan yang kuat untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan manajemen Taman Wisata Alam Gunung Meja
 - b. Pengelolaan kawasan hutan ini cocok untuk menggunakan model manajemen kolaboratif.
 - c. Pentingnya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan konservasi alam.
 - d. Perlunya penelitian lebih skala kecil untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar di wilayah sekitar Taman Wisata Alam Gunung Meja.

Jurnal Kehutanan Papuasia 1 (1):36-52 (2015)

10. Muntasib dan Sunkar, (2005) Alternatif Strategi Pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan strategi pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Adapun hasil penelitian ini adalah strategi yang sesuai untuk pengelolaan taman wisata alam adalah kolaborasi dalam bentuk verifikasi yang meliputi perlindungan aspek ekologis, identifikasi flora, fauna dan geologi, sistem pergantian pimpinan, pengembangan sumber daya manusia, sistem pendanaan taman wisata alam, pengembangan sistem wisata, pembuatan tiket wisata, pengaturan pengunjung,

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, promosi, pemasaran serta komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder*.

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/2213>

Berdasarkan beberapa kajian relevan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan pengelolaan objek wisata di suatu daerah, persamaan lainnya berkaitan dengan pemanfaatan objek wisata bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada beberapa penelitian terdahulu fokus penelitiannya berkaitan dengan strategi, peranan, dan pemberdayaan objek wisata sedangkan fokus penelitian ini lebih difokuskan pada partisipasi masyarakat.

G. Kerangka Konsep

1. Pengertian Partisipasi

a. Pengertian partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*" yang berarti pengambilan bagian, atau pengikutsertaan. Sedangkan kata "*participation*" berasal dari kata "*Participate*" yang berarti mengikutsertakan. Sehingga dapat dikatakan partisipasi merupakan turut serta berperan serta atau keikutsertaan dalam sebuah kegiatan yang bersifat positif untuk kepentingan bersama.

selain itu menurut Sastroeputro (dalam Kusmanto, 2014:85) partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran terhadap kepentingan bersama atau kelompok untuk tercapainya tujuan bersama. Theodorson (dalam Marjidani, 2010:2) mengemukakan bahwa Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan individu atau sekelompok masyarakat dalam sebuah kegiatan yang disertai dengan kesadaran dan bertanggung jawab untuk tercapainya kepentingan bersama.

b. Pengertian masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat ialah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial serta rasa kebersamaan. menurut Ralph Linton (dalam Prasetyo, 2020:164) mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Selaras dengan pendapat di atas Menurut Selo Soemardjan (dalam Prasetyo, 2020:164) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka memiliki kesamaan wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, serta perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Julia, 2012:13) mengatakan bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup bersama
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- 4) Mereka merupakan suatu sistem yang hidup Bersama

Selain itu masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue* dan terikat oleh rasa identitas bersama. Koentjaraningrat (dalam Mustanir, 2017:252).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan dalam satu wilayah untuk waktu yang cukup lama yang memiliki identitas, interaksi, kebiasaan (adat istiadat), kebersamaan, tata cara hidup bersama sesuai dengan batasan-batasan (aturan-aturan) sosial yang berlaku.

c. Pengertian partisipasi masyarakat

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. (Dewi, 2013:133) menurut Adiyoso (dalam Dewi, 2013:132) partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dapat terwujudnya pengembangan desa wisata, apabila terjadi pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan desa wisata hal ini menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata. Nasikun (dalam Dewi, 2013:132)

selain itu terdapat dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata, kedua perspektif tersebut ialah (1) partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan (2) berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menegaskan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan, pengelolaan serta kemampuan menyerap manfaat pariwisata. Timothy (dalam Dewi, 2013:132)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat terhadap pertumbuhan serta pengembangan desa wisata yang harus terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan untuk mendapat manfaat dari pengelolaan wisata untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

d. Tahapan partisipasi masyarakat

Menurut Cohen dan Unpof (dalam Julia, 2020:19) membedakan partisipasi menjadi empat jenis diantaranya:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud nyata dari partisipasi dalam mengambil keputusan bermacam-macam, seperti menghadiri rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam melaksanakan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, di dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi

kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan. Apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Menurut Mardikanto (dalam Mustanir, 2017) tahapan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan
- 4) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Sehingga dapat disimpulkan tahapan-tahapan partisipasi tersebut yang harus diikuti oleh masyarakat dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan sehingga tujuan dari suatu program atau kegiatan dapat terlaksana.

e. Bentuk-bentuk partisipasi

Menurut Sastroeputro (dalam Kusmanto, 2014:85) Bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam pikiran

Partisipasi berupa mengusulkan pendapat dan merencanakan berbagai kegiatan demi kesuksesan atau keberhasilan suatu kegiatan.

- 2) Partisipasi dalam tenaga

Partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

3) Partisipasi dalam keahlian

Bentuk partisipasi ini ialah berdasarkan dari tingkat keahlian, keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian atau seluruh masyarakat.

Menurut pendapat Hamijo dan Iskandar (dalam Bobsuni, 2021:218) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Partisipasi sebuah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sana atau rapat.
- 2) Partisipasi tenaga, yang berikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk industri atau memberikan bantuan melalui keterampilan yang dimiliki kepada desa atau anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam wujud nyata seperti uang, tenaga, harta benda maupun keterampilan serta bentuk partisipasi tidak nyata atau tidak kelihatan, seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, serta partisipasi pengambilan keputusan. Sehingga dalam bentuk apapun masyarakat

dapat berpartisipasi sesuai dengan porsinya masing-masing agar terwujudnya kepentingan bersama.

f. Inovasi-Inovasi Partisipasi

1. Menajamkan prinsip dan Pembelajaran dari Kasus Lain

Bagian panduan partisipasi akan memberikan penajaman konsepsi partisipasi sebagai “proses berbagi dan mengambil bagian dari aktivitas pemerintahan, partisipasi proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan.” Bagian pertama pada kutipan tersebut memberi ruang bagi unsur keterlibatan dan untuk bagian kedua menekankan pada unsur keterwakilannya. Dengan dua elemen ini akan memungkinkan kita mendeteksi keberadaan suatu pemerintahan yang rakyatnya tidak dilibatkan tetapi terwakili atau rakyatnya dilibatkan tetapi mereka tidak memiliki wakil yang mengawal proses kebijakan.

Sedangkan panduan transparansi memberikan pengertian transparansi berkaitan dengan kemungkinan para stakeholder dapat melihat dan mendeteksi apa yang menjadi aktivitas pemerintahan. Maka penajaman juga dilakukan panduan ini dengan menawarkan 2 aspek dari transparansi yaitu, aksesibilitas dan akurasi informasi atas aktivitas pemerintahan.

2. Merancang Mekanisme dan Instrumen

Inovasi kedua yang diuraikan dalam panduan ialah merancang mekanisme dan instrumen yang sensitif terhadap konteks lokal. Disini aplikasi prinsi-prinsip partisipasi, tranparansi, maupun akuntabilitas sering kali menggunakan mekanisme dan instrumen yang hampir sama. Masing-

masing prinsip akan menajamkan mekanisme dan instrumennya secara berbeda.

Panduan transparansi memberikan elaborasi tentang berbagai bentuk aktivitas yang mendukung tercapainya aksesibilitas dan akurasi dari informasi tentang aktivitas pemerintahan sedangkan untuk panduan akuntabilitas menawarkan strategi penguatan baik pada level horizontal, vertical, maupun teknis kelembangaan. Panduan akuntabilitas menguraikan bagaimana desain aktivitas pemerintahan menjadi lebih sensitive terhadap situasi *emergency* baik pada tataran desain, adaptif, dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

3. Mengawal Proses

Inovasi ketiga yang ditawarkan dalam panduan ialah memahami penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagai suatu proses. Sebagai sebuah proses, maka penerapannya membutuhkan pemahaman langkah/tahap penerapannya.

g. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat menurut Aprelia Theresia (2014) ada beberapa faktor pendukung diantaranya:

1) Kemauan

Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, kemauan untuk berpartisipasi ini ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat guna membangun dan memperbaiki kehidupannya.

2) Kemampuan

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak berarti apabila masyarakat sendiri tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

3) Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kesempatan ini merupakan faktor pendorong untuk tumbuhnya kemauan yang pada akhirnya akan menentukan kemauannya.

Sehingga dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat ialah berdasarkan kemauan, kemampuan serta adanya kesempatan bagi masyarakat untuk turut terlibat atau ikutserta berpartisipasi.

Tolak ukur partisipasi masyarakat bergantung pada kontribusi masyarakat dalam setiap tahapan partisipasi masyarakat. Wujud kontribusi masyarakat akan berbeda-beda setiap tahapannya, pada tahap pengambilan keputusan yang menjadi tolak ukurnya seperti kehadiran dalam rapat atau diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan ataupun penolakan pada program yang diusulkan. Selain itu wujud partisipasi pengambilan manfaat yang menjadi tolak ukurnya adalah adanya peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari persentase keberhasilan program.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai pelayan Masyarakat ditingkat Desa merupakan salah satu bentuk negara hadir untuk melayani warganya. Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat ditingkat Desa menyediakan pelayanan kepada Masyarakat serta menyejahterakan Masyarakat desanya. Kesejahteraan Masyarakat akan terwujud apabila kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi, yakni terpenuhi hak-haknya sebagai warga

masyarakat; yaitu bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi serta mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Pemerintah Desa. Hal ini sangat berkaitan erat dengan peran Pemerintah Desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat desa. Dalam kinerjanya, Pemerintah Desa harus menjalankan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan pelayanan di desa mengalami peningkatan dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya. Istanto (dalam Diana Firiana 2019:18) mendefinisikan konsep pemerintahan adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara, selanjutnya Labolo (dalam Diana Fitriana 2019:18) mengungkapkan bahwa tujuan utama di betuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana Masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

a. Kepala Desa

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun Kewenangan Desa meliputi:

- kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- kewenangan lokal berskala Desa;
- kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 tentang ketentuan umum, dalam poin 3 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan selanjutnya dalam pasal 4 tentang pengaturan desa, poin f menyatakan bahwa tujuan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa ada pasal salah satu kewenangan lokal berskala desa dibidang pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa. Selain itu pada pasal 12, Desa memiliki kewenangan di bidang ekonomi local Desa yaitu pengembangan wisata di luar induk pengembangan pariwisata/kota. Begitu juga di dukung dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan dalam pasal 26 ayat 4 Kepala Desa berkewajiban yaitu:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan berkeadilan gender
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik
- Mengelola keuangan dan aset desa
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa
- Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di desa
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa ada pasal 63 yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat. Dengan adanya peraturan di atas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengelola

pariwisata untuk kepentingan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Peran Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Jadi berdasarkan tata kelola dan pemerintahan desa tersebut, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tata kelola oleh pemerintah desa adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu untuk menjalankan suatu fungsi. Jadi, misalnya seseorang mempunyai kedudukan dalam masyarakat diharapkan memiliki peranan dalam masyarakat untuk menjamin suatu kesejahteraan dan kemakmuran.

Dari pengertian di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya masing-masing. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur Masyarakat perdesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pemerintahan di wilayah desa. Berdasarkan kerangka konseptual diatas sehingga penulis menyimpulkan pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur, mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

b. Perangkat Desa

Dalam pasal 48 UU Desa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Perangkat desa ini bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa serta dalam pelaksanaan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Maka dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa yang menyelenggarakan dan menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah desa inilah yang membuat kebijakan dan di bantu oleh perangkat desanya untuk membawa desa yang lebih baik dan mencapai tujuan bersama terutama dalam pengelolaan objek wisata.

3. Konsep objek wisata

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Ritwan (dalam Irfan, 2021:22). Selain itu menurut Suwanto (dalam Irfan, 2021:22) objek wisata adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah.

Wisata dapat dibedakan berdasarkan jenis dan potensi, potensi wisata dibedakan menjadi 3 diantaranya :

a. Potensi alam

Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, seperti pantai, hutan, dan lain-lain. Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan

lingkungan dan sekitarnya niscaya akan menari wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.

b. Potensi kebudayaan

Potensi budaya adalah segala hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monumen dan lain-lain.

c. Potensi manusia

Potensi manusia juga memiliki yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian atau pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa objek wisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu desa atau daerah seperti kekayaan alam, keindahan, maupun hasil buatan manusia yang berpotensi untuk mendorong wisatawan berkunjung ke suatu daerah.

4. Pengelolaan dan Manfaat Objek Wisata

a. Pengertian Pengelolaan

Merupakan terjemahan dari kata Management berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengelola dan mengendalikan. Namun kata Management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan menginterisasi kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien”.

Menurut (Melayu S, 2007:1) pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik dan memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan dalam menggunakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien.

Menurut (Fattah, 2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan seorang manajemen atau pemimpin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam manajemen terdapat proses yang terdiri dari pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengawasan, yang mana tindakan ini adalah proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat dalam suatu kegiatan pengelolaan. Pada penelitian ini peneliti berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh (Fattah, 2004:1) yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

b. Perencanaan

Menurut Susanto N.S (2014:109) perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari

setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. (Manullang, 2002:184).

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu pemantauan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Hal ini dibutuhkan oleh sebuah badan atau sebuah perusahaan untuk mengawasi kinerja dari anggota agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya sendiri. (Manullang, 2002:184).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan suatu manajemen dan proses kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama melalui, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

e. Manfaat Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berdampak bagus untuk meningkatkan ekonomi apabila dikelola dengan baik hal ini sejalan dengan pendapat (Sedarmayanti, 2018:36) yang mengatakan bahwa bila pembangunan dan pengembangan pariwisata direncanakan dan diarahkan dengan baik, maka akan banyak manfaat dan dampak baiknya antara lain:

1. Manfaat Ekonomi

Meningkatnya arus wisatawan lokal maupun mancanegara ke suatu daerah menuntut aneka ragam pelayanan dan fasilitas yang semakin meningkat jumlah dan ragamnya. Hal ini memberi manfaat ekonomi bagi penduduk, pengusaha maupun pemerintah setempat di antaranya:

- Penerimaan devisa
- Kesempatan berusaha
- Terbukanya lapangan kerja
- Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah
- Mendorong pembangunan daerah
- Pendapatan daerah(PAD)

2. Manfaat Sosial Budaya

- Pelestarian budaya dan adat istiadat
- Meningkatkan kecerdasan masyarakat
- Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani maupun rohani
- Mengurangi konflik sosial

3. Manfaat dalam Berbangsa dan Bernegara

- Mempererat persatuan dan kesatuan
- Menimbulkan rasa memiliki, keinginan untuk memelihara dan mempertahankan negara yang ujungnya tumbuh rasa cinta terhadap tanah air
- Memelihara hubungan baik internasional dalam hal pembangunan pariwisata

4. Manfaat Bagi Lingkungan

Pembangunan dan pengembangan pariwisata diarahkan agar dapat memenuhi keinginan wisatawan seperti, hidup tenang, bersih, jauh dari polusi, santai dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara dalam upaya untuk

melestarikan lingkungan di samping akan memperoleh nilai tambah atas pemanfaatan dari lingkungan yang ada.

Dari berbagai penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah segala kegiatan yang diperlukan seseorang atau sekelompok untuk menikmati keindahan objek wisata yang tersedia dan juga sebagai tempat rekreasi banyak orang baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk memuaskan diri. Selain itu juga masyarakat setempat dapat memanfaatkan wisata yang ada untuk meningkatkan perekonomian dan menambah pendapatan melalui usaha-usaha kreativitas serta terbentuknya lapangan pekerjaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintegrasikan data ditempat penelitian secara objektif. Untuk mendapatkan data yang tepat sesuai apa yang diinginkan maka akan dilakukan interview kepada beberapa subyek yang berkaitan dengan pengelolaan wisata tebing bereksi. Pendekatan secara kualitatif diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Dapat dikatakan bahwasannya penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti (Margareta, 2013).

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subyek penelitian. Dengan penjelasan di atas, maka penulis meletakkan unit analisis pada obyek dan subyek penelitian. Obyek dan subyek dalam penelitian ini yaitu:

a. Obyek

Obyek dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Tebing Breksi”

b. Subyek

Dalam penelitian ini, sumber data dipilih secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data, kedudukan dan fungsi kedalaman informasi yang dibutuhkan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Informen

No.	Nama	Jabatan	Umur	Gelar
1	Mujimin, S.Sos	Carik	49	S1
2	Tarini	Kaur tata laksana	58	SLTA
3	Dwi Santoso	Ketua BPKal	44	SLTA
4	Giyatno	Direktur BUM Kal	40	SMK
5	Moehamed Halim, S.H	Humas dan informasi objek wisata Tebing Breksi	63	S1
6	Ayi Wahyudin	Informasi objek wisata Tebing Breksi	46	SMA

7	Marsih	Pengusaha kuliner	55	SD
8	Arijatimiko	Sopir jeb	31	SMA
9	Triyanto	Petugas kebersihan	43	SMP
10	Tukinem	Pedagang	56	SD
11	Suroso	Pembuat batako	40	SMP
12	Yulianto	Fotografer	34	SMP
13	Harianto	Tokoh budaya	54	SLTA

Sumber data: data lapangan peneliti, 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada tiga teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi Sebagai metode pengumpulan data, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang Nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti Widoyo (dalam Dimu, 2021:21).

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Riyanto (dalam Adrika, 2020: 98). Metode dokumentasi mencari data-data, atau sumber lain berupa gambar yang berkaitan dengan obyek dan keperluan penelitian. Adapun

dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: Perdes, ADART Objek Wisata Tebing Breksi, Rencana Kerja.

c. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dimana wawancara mendalam (*in-dephtinterview*) Adalah suatu proses mendapat informasi untuk kepentingan penelitian dengan Tanya jawab antara peneliti dengan informan sehingga dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Satori dan Komariah (dalam Adrika, 2020:98) Pengumpulan data dengan teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan dari subyek yang telah di tentukan penelti.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang dari mana data diperoleh. Sumbe data dalam penelitian ini menggunakan 2(dua) sumber yaitu:

1. Sumber data primer, sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi.
2. Sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah berupa data sumber lain atau berupa catatan-cacatan berdasarkan yang ada di lapangan seperti dokumen-dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan sudah terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya. Kemudian diolah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan.

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan di pisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (dalam Latifah, 2021:177) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif diantaranya:

a. Reduksi data (*reduction*)

Reduksi data dilakukan untuk menentukan data yang relevan, bermakna serta hal-hal penting berdasarkan penelitian yang dilakukan serta mendapatkan data yang peneliti butuhkan.

b. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif (dengan teks)

c. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan dari kegiatan pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display data*, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN SAMBIREJO

A. Sejarah Kalurahan Sambirejo

Saat terbentuknya kalurahan lama Groyokan yaitu munculnya rijksblat Nomor 11 Tahun 1946 tanggal 15 Mei 1916 dan Sleman menjadi Distrik Kabupaten Yogyakarta dan

baru tanggal 8 April 1945, Sry Sultan Hamengku Buwono IX Kasultanan Yogyakarta melalui koriangka (loro) 2 wilayah Sleman pada status semata sebagai Kabupaten dengan penguasa Knajeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai bupati Sleman, pada saat itu wilayah Sleman membawahi 17 Kapanewon 258 Kalurahan.

Kalurahan Sambirejo menurut narasumber Bapak Mujimin, Bapak Dwi Santoso, dan Bapak Suhariato bahwa kebiasaan mengadakan pertemuan setiap hari Kamis Kliwon mengambil kebiasaan pada zaman Almarhum Bapak Wongso Semito yang pada masa itu menjabat menjadi Lurah. Menurut pengamatan para narasumber Kalurahan lama Groyokan yang sekarang disebut Kalurahan Sambirejo berdiri pada hari Kamis Kliwon, 27 April 1927 di kampung Groyokan Nglengkong berada di tengah-tengah wilayah Kalurahan lama Groyokan yang sekarang disebut Kalurahan Sambirejo.

B. Visi dan Misi

1. Visi Kalurahan Sambirejo

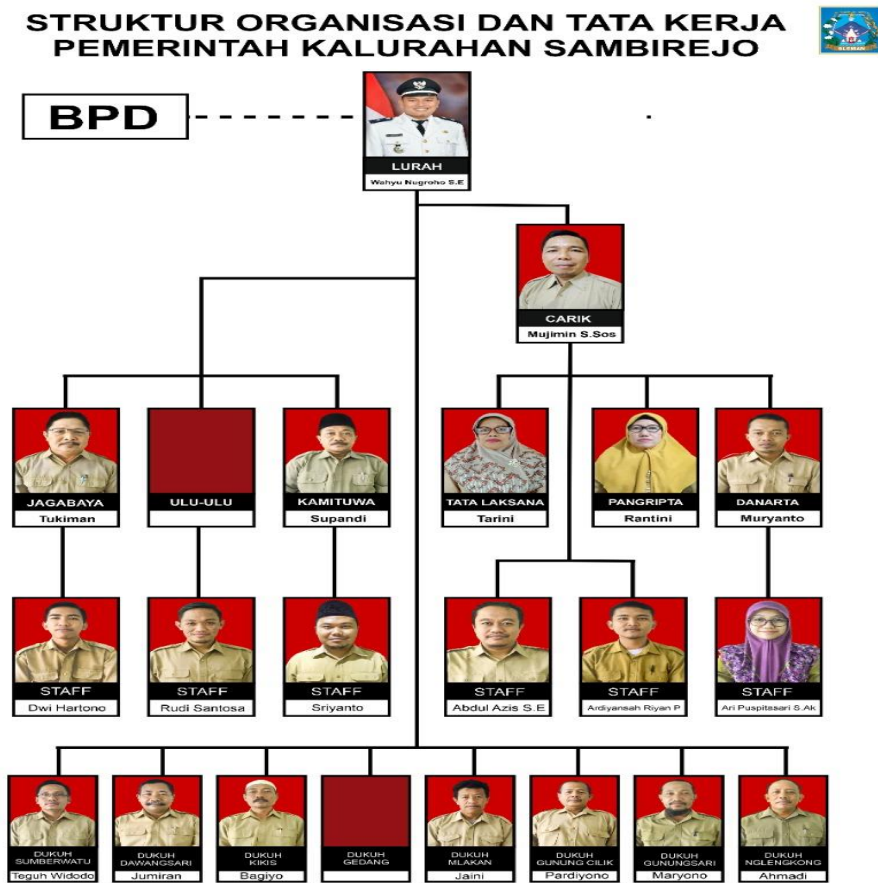
Terwujudnya good governance pada pemerintahan Kalurahan Sambirejo dalam rangka optimalisasi potensi dan pemerataan pembangunan Kalurahan.

2. Misi Kalurahan Sambirejo

- Partisipasi
- Penegakan hukum
- Transparansi
- Daya tangkap
- Berorientasi konsensus
- Berkeadilan
- Efektifitas dan efisiensi
- Akuntabilitas

C. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 bagan struktur organisasi Kalurahan Sambirejo



Sumber data : <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Keterangan:

- Lurah : Wahyu Nugroho, S.E
- Carik : Mujimin, S.Sos
- Kepala Urusan Danarta : Muryanto
- Kepala Urusan Pangripta : Rantini
- Kepala Urusan Tata Laksana : Tarini
- Jagabaya : Tukiman
- Kamituwa : Supandi
- Ulu-ulu : Nur Cahyanto

- Staff Danarta : Ari Puspitasari, S.Ak
- Staff Pangripta : Ardiyansah Riyan P
- Staff Kamituwa : Sriyanto
- Staff Ulu-ulu : Rudi Santosa, S.E
- Staff Jagabaya : Dwi Hartono
- Staff Kesekretariatan (Arsip & Inventaris) : Abdul Azis, S.E
- Staff Kesekretariatan (Teknologi Informasi) : Sigit Prasetyo
- Staff Kesekretariatan (Teknologi Informasi) : Restu Hayyu Khoirunnisa, S.Pd
- Dukuh Sumberwatu : Teguh Widodo
- Dukuh Dawangsari : Jumiran
- Dukuh Kikis : Bagiyo

Pada gambar bagan di atas dapat dilihat bagaimana struktur alur kerja pemerintah di Kalurahan Smabirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Gambar bagan di atas belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tahun 2015 karena masih mencantumkan BPD pada bagan struktur organisasi. Bagan di atas menggambarkan bahwa dalam pemerintahan Kalurahan Sambirejo adalah bagian pelaksa pemerintahan dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat, disisi lain juga adanya kontrol terhadap proses kerja pemerintah Kalurahan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digambarkan dengan garis koordinasi putus-putus yang berarti BPD adalah mitra pemerintah Kalurahan. BPD dalam hal ini merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis yang nantinya menjadi wakil dari kelompok masyarakat menjadi mitra pemerintah Kalurahan dalam menjalankan proses roda pemerintahan di kalurahan Samburejo.

Demi keberlangsungan pemerintahan yang baik (*good Governance*) BPD sebagai wakil kelompok masyarakat memiliki peran penting ialah sebagai penampung dan aktor

penyalur atau sebagai penyapai aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah Kalurahan serta mengawasi dan memberi evaluasi terhadap proses pemerintahan di Kalurahan Sambirejo.

Gambar 2.2 bagan kepengurusan Tebing Breksi



Sumber : sekretariat informasi Tebing Breksi

D. Keadaan Geografis

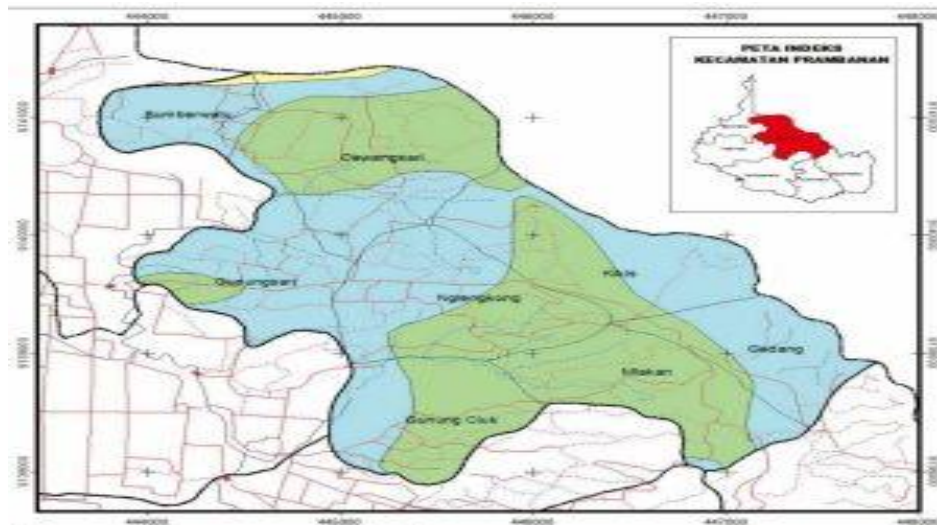
Kondisi geografis adalah sebuah keadaan di permukaan bumi dengan di lihat dari aspek letak relief, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna. Pada bab ini akan dijelaskan kondisi geografis yang ada di Kalurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kondisi Fisik

Kalurahan Sambirejo berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak dari ibu kota kecamatan 3 KM, jarak dengan ibu kota kabupaten sejauh 22 KM dan jarak dengan ibu kota provinsi sejauh 17 KM. Kalurahan Sambirejo menempati area perbukitan berbatu, kering dan merupakan lahan kritis dengan keadaan jalan 90 % menanjak Secara geografis ketinggian wilayah kurang lebih 300 – 425m dpl, memiliki curah hujan 2000-3000 mm/tahun dengan bulan hujan selama 6 bulan, suhu udara rata-rata ialah 23°C – 32°C.

2. Batas Wilayah

Gambar 2.3 batas wilayah Kalurahan Sambirejo



Sumber data : <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Kalurahan Sambirejo mempunyai luas wilayah 839.6375 Ha dan berada di koordinat bujur 110.5088 koordinat lintang -7.782435, 90% menempati pegunungan berbatu. Berbatasan langsung dengan :

- Utara : Desa Pereng, Desa Sengon Kecamatan Prambanan Klaten
- Selatan : Kalurahan Wukirharjo, Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Sleman
- Barat : Kalurahan Madurejo, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Sleman
- Timur : Desa Katekan Gantiwarno Klaten, Kalurahan Gayamharjo Prambanan Sleman.

3. Pembagian Luas Wilayah

Tabel 2.1 pembagian wilayah Kalurahan Sambirejo

No	Wilayah	Jumlah	
		RT	RW
1.	Padukuhan Sumberwatu	4	2
2.	Padukuhan Dawangsari	4	2

3.	Padukuhan Kikis	7	3
4.	Padukuhan Gedang	5	2
5.	Padukuhan Mlakan	5	2
6.	Padukuhan Gunung Cilik	5	2
7.	Padukuhan Gunungsari	8	3
8.	Padukuhan Nglengkong	7	3
Total		45	19

Sumber: RPJMKal Sambirejo, 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan RT dan RW yang dimiliki Padukuhan yang ada di Kalurahan Sambirejo sebanyak 45 RT dan 19 rw dengan Padukuhan yang memiliki RT terbanyak terdapat di Padukuhan Gunungsari sebanyak 8 RT dengan jumlah 3 RW kemudian untuk Padukuhan Sumberbatu dan Padukuhan Dawangsari memiliki jumlah RT dan RW Yang sama yakni 4 RT dan 2 RW yang dimana kedua Padukuhan ini memiliki jumlah RT yang paling sedikit di Kalurahan Sambirejo. Selanjutnya akan ditampilkan tabel luas wilayah Kalurahan Sambirejo berdasarkan penggunaannya.

Tabel 2.2 luas wilayah berdasarkan penggunaan

No	Sektor	Luas Lahan
1.	Sawah	304,72 Ha
2.	Tegal/lading	143,12 Ha
3.	Pemukiman	45,00 Ha
4.	Pekarangan	194,85 Ha
5.	Kas Desa	129,70 Ha
6.	Tanah Bengkok	28,15 Ha
7.	Sawah desa	101,54 Ha
8.	Jalan	21,00 Ha
Total		839,65 Ha

Sumber: RPJM Kal Sambirejo, 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas lahan yang paling banyak digunakan adalah pekarangan seluas 194,85 Ha Sedangkan penggunaan lahan yang paling sedikit adalah jalan seluas 21,00 Ha. Dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Kalurahan Sambirejo adalah area persawahan dibuktikan dengan wilayah untuk sector sawah seluas 304,72 Ha dan sawah desa 101,54 Ha.

E. Keadaan Demografis

Data demografis penting untuk Pemerintah Kalurahan, dengan adanya data tersebut Kalurahan bisa dengan mudah memantau masyarakatnya. Lebih lanjut Lagi pengertian keadaan demografis meliputi distribusi penduduk, ukuran, struktur serta Kalurahan bisa mengetahui perubahan setiap waktunya yang diakibatkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat ditentukan berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, agama, usia, jumlah kepala keluarga (KK), tingkat pendidikan, mata pencarian dan jumlah pengangguran.

Gambar 2.4 data penduduk



Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

1. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin

Data penduduk Kalurahan Sambirejo berdasarkan klasifikasi jenis kelamin menyajikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara demografis jumlah penduduk Kalurahan Sambirejo adalah 5.861 jiwa. Berikut tabel yang menyajikan keadaan demografis di Kalurahan Sambirejo.

Tabel 2.3 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	2.892
2.	Perempuan	2.969
Total		5.861

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kalurahan Sambirejo yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.892 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.969 jiwa sehingga jumlah total penduduk berdasarkan jenis kelamin sebanyak 5.861. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak atau lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

2. Data penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

Kalurahan Sambirejo memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak KK Yang terbagi menjadi KK laki-laki dan KK perempuan. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK).

Tabel 2.4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan jenis kelamin

No.	Klasifikasi	Jumlah (KK)
1.	KK Laki-Laki	1.768
2.	KK Perempuan	280
Total		1.986

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Berdasarkan tabel diatas Kalurahan Sambirejo memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.986 KK yang diklasifikasikan menjadi KK laki-laki dan KK perempuan. Dilihat dari jumlah KK yang tertera pada tabel jumlah KK yang paling

banyak adalah KK laki-laki sebanyak 1.768 dan yang paling sedikit KK perempuan sebanyak 280 sehingga memiliki selisih yang cukup besar.

3. Data penduduk berdasarkan Agama

Indonesia memiliki 6 keyakinan yang diakui oleh negara diantaranya yaitu, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur setiap warga negara bebas memeluk agama seperti yang termuat dalam pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Berikut adalah data jumlah penduduk Kalurahan Sambirejo yang diklasifikasikan berdasarkan Agama.

Tabel 2.5 Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	5.784
2.	Kristen	13
3.	Katolik	59
4.	Hindu	5
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0
Total		5.861

Sumber: RPJM Kal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Kalurahan Sambirejo adalah agama Islam dengan jumlah sebanyak 5.784 jiwa kemudian di ikuti oleh agama Katolik sebanyak 59 jiwa kemudian Kristen 13 jiwa dan Hindu 5 jiwa sedangkan agama Budha dan Konghucu sebanyak 0 Jiwa yang dimana masyarakat Kalurahan Sambirejo tidak memiliki masyarakat yang menganut agama Budha dan Konghucu. Sehingga jumlah penduduk Kalurahan Sambirejo berdasarkan agama sebanyak 5.861 jiwa.

4. Data penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.6 Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak sekolah atau belum sekolah	838
2.	SD/Sederajat	533
3.	Tamat SD/Sederajat	1.248
4.	SLTP/Sederajat	814
5.	SLTA/Sederajat	1.055
6.	Diploma I/II	3
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	13
8.	Diploma IV/Strata I	39
9.	Strata II	2
10.	Strata III	0
Total		4.545

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tamat SD/Sederajat menduduki peringkat pertama terbanyak di Kalurahan Sambirejo dengan jumlah 1.248 jiwa atau sebanyak 26,27% kemudian SLTA/Sederajat sebanyak 1.055 jiwa atau 19,92%. Kemudian dengan melihat data yang paling sedikit di kalurahan Sambirejo warga yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi adalah Strata II dengan jumlah 2 jiwa atau 0,05%. Dilihat dari jumlah tidak sekolah atau belum sekolah dengan jumlah sebanyak 838 jiwa dapat dikatakan bahwa masih ada kurangnya kesadaran dan motivasi untuk sekolah.

5. Data penduduk berdasarkan pekerjaan

Masyarakat dalam suatu lingkungan pasti memiliki beragam pekerjaan, salah satu tujuan masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk keberlangsungan

hidup. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya, berikut adalah jumlah data penduduk Kalurahan Sambirejo berdasarkan pekerjaannya.

Tabel 2.7 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Anggota DPRD kab./kota	1	0,02
2.	Belum atau tidak bekerja	667	16,03
3.	Bidan	1	0,02
4.	Buruh harian lepas	1.047	20,94
5.	Buruh Tani/Perkebunan	177	4,25
6.	Dosen	1	0,02
7.	Guru	6	0,14
8.	Karyawan Honorer	3	0,07
9.	Karyawan Swasta	333	8
10.	Kepala Desa	1	0,02
11.	Kepolisian RI (Polri)	1	0,02
12.	Mekanik	1	0,02
13.	Mengurus Rumah Tangga	437	10,5
14.	Pedagang	12	0,29
15.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32	0,77
16.	Pelajar/Mahasiswa	544	13,7
17.	Pembantu Rumah Tangga	1	0,02
18.	Pensiunan	3	0,07
19.	Perangkat Desa	15	0,36
20.	Perawat	1	0,02
21.	Perdagangan	22	0,53
22.	Petani atau Perkebunan	484	11,63
23.	Sopir	1	0,02
24.	TNI	1	0,02
25.	Tukang Batu	2	0,05
26.	Wiraswasta	99	2,38
Total		3.893	100

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Sambirejo memiliki beberapa pekerjaan dan diantara pekerjaan yang dimiliki warga Kalurahan Sambirejo yang paling banyak ialah sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 1.407 jiwa kemudian disusul dengan warga yang belum bekerja atau yang tidak bekerja sebanyak 667 jiwa sedangkan pekerjaan yang paling sedikit dimiliki oleh warga Kalurahan Sambirejo adalah sebagai anggota DPRD, Bidan, Dosen, Kepala Desa, Polisi, Mekanik, Pembantu Rumah Tangga, Perawat, Sopir, TNI, dan Tukang Batu sebanyak 1 jiwa. Jumlah penduduk Kalurahan Sambirejo berdasarkan pekerjaan jumlah total sebanyak 3.893 jiwa.

F. Keadaan Sosial Budaya

Di Kalurahan Sambirejo terdapat jenis kesenian yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satu kesenian yang masih dilestarikan adalah Jathilan. Masyarakat Kalurahan Sambirejo masih banyak yang tertarik dengan kesenian jhatilan ini sehingga masih menjadi pertunjukan seni yang banyak diminati masyarakat setempat. Masyarakat juga masih mempertahankan adat istiadat yang ada di Kalurahan Sambirejo hingga sekarang masih melakukan berbagai upacara tradisi adat istiadat di antaranya:

1. Slametan

Slametan merupakan tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa.

Slametan ini bentuk acara syukuran dengan mengundang para kerabat atau tetangga.

Acara slametan contohnya seperti :

- Mitoni (7 bulanan kehamilan)
- Puputan (slametan pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering)
- Sepasaran (15 hari manusia lahir)
- Selapanan (35 hari manusia lahir)
- Wiwit (syukuran atas diberikannya hasil panen yang melimpah)

2. Rasulan

Rasulan merupakan salah satu tradisi khas masyarakat Sambirejo, tradisi rasulan ini juga dikenal dengan bersih dusun atau desa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kearifan lokal rasulan ini patut untuk selalu dilestarikan oleh masyarakat Sambirejo.

3. Selamatan meninggal dunia

Selamatan yang dilakukan apabila ada warga yang meninggal dunia.

Selamatan di masyarakat Jawa yaitu :

- Selamatan 3 hari, 7 hari, 100 Hari,
- Pendak sepisan, pendak pindhho
- Nyewu (1000 hari) sebagai puncaknya.

G. Keadaan Ekonomi

Gambaran keadaan ekonomi masyarakat Kalurahan Sambirejo, di antaranya :

1. Angkatan kerja

Warga Kalurahan Sambirejo yang bekerja dapat dilihat dari rincian jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan umur atau usia kerja. Di bawah ini merupakan tabel jumlah penduduk Kalurahan Sambirejo yang bekerja.

Tabel 2.8 jumlah penduduk bekerja berdasarkan umur/usia kerja

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19 tahun	217	213	430
2	20-24 tahun	242	253	495
3	25-30 tahun	351	362	713
4	31-34 tahun	364	386	750

5	35-39 tahun	376	385	761
6	40-44 tahun	253	254	507
7	45-49 tahun	150	155	305
8	50-54 tahun	123	132	255
9	55-59 tahun	87	98	185
10	60-64 tahun	48	110	158
11	Usia > 65 tahun	23	48	71
Jumlah		2234	2396	4630

Sumber : RPJM Kal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa di Kalurahan Sambirejo warga yang bekerja memiliki usia kisaran mulai dari 15- 65 tahun ke atas. Warga yang berusia kisaran 35-39 tahun yang menjadi pekerja paling banyak sejumlah 761 jiwa yang terbagi menjadi 376 laki-laki dan 385 perempuan. Sedangkan untuk warga yang berusia 65 tahun ke atas menjadi pekerja paling sedikit dengan jumlah 71 jiwa yang terdiri dari 23 laki-laki dan 48 perempuan. Berdasarkan usia produktif (15-64 tahun) di Kalurahan Sambirejo usia 65 tahun ke atas (usia tidak produktif) masih ada yang bekerja walaupun jumlahnya tidak sebanyak penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kalurahan Sambirejo yang berkerja sebanyak 4.630 yang terdiri dari berbagai usia dari 15- usia > 65 tahun.

2. Pengangguran

Di bawah ini merupakan tabel jumlah pengangguran yang terdapat di Kalurahan Sambirejo. jumlah pengangguran dirinci berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2.9 jumlah pengangguran berdasarkan kelompok umur

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
----	------------	-----------	-----------	--------

1	15-19 tahun	0	0	-
2	20-24 tahun	0	0	-
3	25-30 tahun	3	0	3
4	31-34 tahun	0	0	-
5	35-39 tahun	0	4	4
6	40-44 tahun	0	2	2
7	45-49 tahun	0	5	5
8	50-54 tahun	0	0	-
9	55-59 tahun	2	3	5
10	60-64 tahun	3	4	7
11	Usia > 65 tahun	8	7	15
Jumlah		16	25	41

Sumber: RPJM Kal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah pengangguran yang berada di Kalurahan Sambirejo sebanyak 41 jiwa yang terbagi kedalam berbagai usia dari umur 15 - umur > 65 tahun dengan jumlah pengangguran yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 jiwa. Pengangguran terbanyak pada usia >65 tahun sebanyak 15 jiwa, hal ini sesuai dengan usia produktif yang dimana pada usia lebih dari 65 tahun bukan lagi menjadi usia produktif untuk bekerja.

3. Kesejahteraan Keluarga

Tabel 2.10 jumlah tahapan keluarga sejahtera

No	Indikator	Jumlah
1	Tahapan keluarga sejahtera I (KS I)	2275
2	Tahapan keluarga sejahtera II (KS II)	968
3	Tahapan keluarga sejahtera III (KS III)	2021

4	Tahapan keluarga sejahtera III plus	311
---	-------------------------------------	-----

Sumber: RPJM Kal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kalurahan Sambirejo berada pada tahapan keluarga sejahtera I, II, III dan III plus, dengan tahapan keluarga sejahtera I yang paling banyak sejumlah 2275 sedangkan yang paling sedikit tahapan keluarga sejahtera III plus sejumlah 311.

4. Penguasaan aset ekonomi masyarakat

Penguasaan aset ekonomi masyarakat terpusat pada beberapa titik yang di manfaatkan sebagai tempat wisata seperti Tebing Breksi, Watu Payung, serta Watu Tapak. dengan adanya tempat wisata ini diharapkan menarik wisatawan untuk berkunjung sehingga memberikan pemasukan ekonomi bagi masyarakat Sambirejo. Tempat wisata tersebut dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Sambirejo.

H. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah salah satu penunjang kegiatan atau aktivitas masyarakat, dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia di Kalurahan Sambirejo diharapkan dapat memudahkan kegiatan masyarakat. Berikut adalah sarana dan prasarana yang terdapat di Kalurahan Sambirejo diantaranya sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, dan sarana dan prasarana keagamaan.

Tabel 2.11 Sarana dan prasarana keagamaan

No.	Tempat Ibadah	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1.	Masjid	12	63,1
2.	Mushola	6	31,5
3.	Pura	1	5,4

Total	19	100
--------------	-----------	------------

Sumber : RPJM Kal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas sarana dan prasarana keagamaan yang paling banyak adalah masjid sebanyak 12 unit selanjutnya mushola sebanyak 6 unit, banyaknya masjid dan mushola dikarenakan warga Kalurahan Sambirejo kebanyakan beragama Islam kemudian sarana dan prasarana keagamaan yang paling sedikit adalah pura yang digunakan umat Hindu untuk beribadah Pura ini bernama Pura Dharma Santi yang terletak di Dusun Sumberwatu.

Tabel 2.12 Sarana dan prasarana Pendidikan

No.	Sekolah	Jumlah (Unit)
1.	TK	1
2.	SD	2
3.	SMP	1
Total		4

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Sambirejo sejumlah 4 unit yang terbagi menjadi 3 yakni TK, SD, dan SMP. Sarana dan prasarana paling sedikit sekolah TK dan SMP masing-masing sebanyak 1 unit dan sarana prasarana pendidikan paling banyak SD sejumlah 2 unit.

Tabel 2.13 Sarana dan prasarana Kesehatan

No.	Tempat Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Polindes	1
Total		2

Sumber: <https://desasambirejo.smartvillagenusantara.id/>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tebing Breksi

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat diantaranya partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pengawasan serta partisipasi dalam pengambilan manfaat.

- a. Dalam hal pengambilan keputusan masyarakat sudah turut serta berpartisipasi dalam pembentukan awal objek wisata Tebing Breksi maupun dalam pengembangan objek wisata Tebing Breksi seperti mengikuti musyawarah dan memberikan ide-ide gagasan atau aspirasinya meskipun dalam partisipasi pengambilan keputusan belum berjalan maksimal karena masyarakat yang terlibat merupakan perwakilan tidak secara keseluruhan dari elemen-elemen masyarakat sehingga dalam pengembangan objek wisata tebing Breksi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah tentunya masyarakat-masyarakat yang terlibat langsung dengan objek wisata Tebing Breksi sehingga masyarakat tersebut aktif dalam musyawarah dalam lingkup yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing seperti bagian kuliner akan memiliki musyawarah tersendiri begitupun bagain pengelola memiliki musyawarah tersendiri sedangkan masyarakat di luar lingkup objek wisata Tebing Breksi ini sangat jarang terlibat dalam musyawarah.
- b. Dalam hal partisipasi pengambilan manfaat masyarakat mendapatkan hasil dari adanya objek wisata Tebing Breksi tersebut akan tetapi manfaat yang dirasakan ini belu sepenuhnya menyeluruh dirasakan oleh masyarakat Kalurahan Sambirejo. yang merasakan manfaat dengan adanya objek wisata Tebing Breksi ini tentunya yang terlibat langsung seperti pengurus yang mendapatkan gaji selain gaji para pengurus juga mendapatkan manfaat peningkatan skill ini lebih dirasakan oleh

pengelola seperti mendapatkan beberapa pelatihan-pelatihan serta kursus yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan para pengurus. Serta yang merasakan manfaatnya para pekerja di dalam objek wisata Tebing Breksi seperti usaha kuliner, serta penyewa jasa yang mendapatkan untung dari para pengunjung akan tetapi bagi masyarakat di luar lingkup pengurus dan pekerja yang berada di wilayah objek Tebing Breksi belum merasakan kesejahteraan dengan adanya objek wisata Tebing Breksi ini. Bahkan ada warga yang menutup usaha warungnya karena sepi pembeli dengan begitu dapat dikatakan belum meratanya kesejahteraan yang dirasakan masyarakat kalurahan Sambirejo.

- c. Pengurus objek wisata Tebing Breksi keseluruhannya merupakan masyarakat Kalurahan Sambirejo itu sendiri sehingga dalam hal pengawasan secara langsung masyarakat turut serta mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan objek wisata Tebing Breksi. Masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan ini nantinya juga turut serta dalam musyawarah RT di tempat tinggal mereka dan memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan atau program-program apa saja yang akan dilakukan sehingga secara tidak langsung masyarakat yang tidak tergabung dalam kepengurusan bisa ikut serta mengawasi segala kegiatannya agar tetap berjalan pada tujuan awal objek wisata tersebut dibentuk. Akan tetapi masih memiliki kekurangan sebab masyarakat di luar lingkup objek wisata Tebing Breksi kebanyakan tidak terlibat dalam musyawarah sehingga hal inilah yang seharusnya di perhatikan pemerintah Kalurahan untuk menyamaratakan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti:

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan lagi guna mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai musyawarah yang ada di Kalurahan Sambirejo. Sehingga banyak masyarakat yang bisa memberikan ide-ide atau aspirasi untuk kemajuan ataupun untuk perkembangan objek wisata Tebing Breksi tersebut. Serta diharapkan setiap musyawarah melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat baik dari kalangan petani, buruh, peternak, pedagang yang ada di Kalurahan Sambirejo sehingga dalam pengambilan keputusan untuk program ataupun pembangunan yang dilakukan bisa diketahui secara luas oleh masyarakat serta dalam melaksanakan suatu program atau pembangunan bisa mempertimbangkan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh setiap elemen-elemen masyarakat tersebut sehingga tidak adanya kesenjangan partisipasi di antara masyarakat. Kemudian Perlu adanya inovasi yang harus dilakukan dalam penerapan pada pengelolaan objek wisata Tebing Breksi agar manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dirasakan secara merata dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirasputra, A. (2018). Peran Kelompok Sadar Wisata Tlatar Seneng dalam Taman Tebing Breksi di Dusun Ngelekgkong Sambirejo Prambanan Sleman Yogyakarta . *Skripsi*, 80.
- Adrika, d. (2020). Ritual Singku Sariga Pada Masyarakat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Walio Kota Baru. *Jurnal Kelisanan Satra dan Budaya*, 98.
- Arianti, S. (2019). Analisis Geografi Terhadap Potensi Wisata Pelabuhan Kereng Bangkirai Palangkaraya. *Meretas*, 134.
- Baskoro, S. (2020). Analisi Pengembangan Benteng Van Der Wijck Sebagai Daya Tarik Wisata . *Skripsi*.
- Bobsuni, N. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam . *Jurnal Publika*, 218.
- Dewi, M. H. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 133.
- Dewi, M. H. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 132.
- Dimu, Y. Y. (2021). Pengelolaan Wisata Kuliner Ngingrong Oleh Pemerintah Desa Kelurahan dan Pokdarwis . *Skripsi*, 21.
- Erawan, I. P. (2009). *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Fattah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Hermawan, I. A. (2015). Peran Serta Pemerintah dalam Pembangunan Desa Melalui Kebijakan Desa Wisata. *Prosiding Seminar Slamet Ryadi Conference on Public Administration* , 2.
- Imbiri, S. (2015). Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja di Kabupaten Manokwari . *Jurnal Kehutanan Papuanesia*, 36.
- Irfan, A. (2021). Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Skripsi*, 22.
- Julia, F. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang . *Skripsi*, 19.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* , 85.
- Latifah, N. (2021). Analisis Atention Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Basicedu*.
- Manullang, M. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen* . Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Marjidani, P. (2010). Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa. *Jurnal Buletin Ekonomi*, 2.

- Melayu S, P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sindereng Kabupaten Sindereng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 252.
- Oktadiyani, P. (2005). Alternatif Strategi Pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Konservasi*.
- Pain, M. (2020). Efektivitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata. *Skripsi*, 16.
- Pambudi, A. (2018). Revitalisasi Sumber Daya Alam Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata. *Skripsi*, 84.
- Prasetyo, D. (2020). Memahami Masyarakat dan Prespektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 164.
- Purba, E. (2019). Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Makam Papan Tinggi di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Skripsi*.
- sari, N. P. (2019). Evaluasi Pengelolaan Geowisata Pada Fasilitas dan Atraksi Wisata di Taman Tebing Breksi. *Skripsi*, 195.
- Sedarmayanti, d. (2018). *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Settyoko, J. (2019). Strategi Pemerintahan Desa dalam Mengembangkan Pariwisata. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 40.
- Siam, N. (2015). Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Ipteks Terapan*, 20.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2012 Pasal (6) Tentang Pembangunan Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 41 Tentang Partisipasi
- Dokumen-dokumen lain:
- dokumen Rencana Ppembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sambirejo 2021-2026
- Desasambirejosmartvilagenusantara.com.id

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kalurahan Sambirejo

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan/jabatan :
6. Alamat :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Sambirejo melibatkan masyarakat dalam setiap forum musyawarah mengenai rencana pembentukan objek wisata Tebing Breksi?
2. Siapa saja yang kemudian yang mengambil keputusan akhir dalam rencana pembentukan objek wisata Tebing Breksi?
3. Apa saja bentuk program dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Sambirejo?
4. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya objek wisata Tebing Breksi?
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola Tebing Breksi kepada Pemerintah Kalurahan dan masyarakat?

Pertanyaan Untuk Pengelola Tebing Breksi

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan/jabatan :
6. Alamat :

B. Pertanyaan

1. Kontribusi apa saja yang diberikan pengelola dalam kegiatan musyawarah mengenai rencana pembentukan objek wisata Tebing Breksi?
2. Dengan adanya objek wisata Tebing Breksi apa saja manfaat yang diperoleh pengelola?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Tebing Breksi?
4. Bagaimana pertanggung jawaban hasil pengawasan oleh pengelola objek wisata Tebing Breksi?
5. Tindak lanjut seperti apa yang dilakukan pengelola Tebing Breksi terhadap kendala yang dialami selama mengelola objek wisata Tebing Breksi?

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan/jabatan :
6. Alamat :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara terhadap ide atau gagasan pembentukan objek wisata Tebing Breksi?
2. Kontribusi apa saja yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam kegiatan musyawarah pembentukan objek wisata Tebing Breksi?
3. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh Bapak/Ibu/Saudara semenjak terbentuknya objek wisata Tebing Breksi?
4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut mengawasi terbentuknya program objek wisata Tebing Breksi?

LAMPIRAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Alamat: Jl. Temoho No. 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 561971, 550775 Fax (0274) 515989 website: www.apmd.ac.id e-mail: info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 203/IT/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

- Nama : Habib Abdul Subhiakti Mansyur
Nomor Mahasiswa : 18520145
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
- a. Tempat : Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman
 - b. Sasaran : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
 - c. Waktu : 2 Mei 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 28 April 2023
Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
Kontak: 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



Lumbung Desa STPMD "APMD"

Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" J. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: papapmd@gmail.com tlp/WA:0851-7120-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: HABIB ABDUL SUBHIAKTI MANSUR

Judul makalah: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK
WISATA TEBING BREKSI DI KALURAHAN SAMBIREJO
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN

Tanggal pemeriksaan: 2 Agustus 2023

Persentase plagiasi: 15%



Petugas: Checked By:

Rendi Yogi Kusbiantara





Gambar 1. foto bersama bapak Carik Kalurahan Sambirejo



Gambar 2. foto bersama ketua BPD



Gambar 3. foto bersama ketua BUMDes



Gambar 4. foto bersama tokoh masyarakat



Gambar 5. foto bersama fotografer objek wisata Tebing Breksi



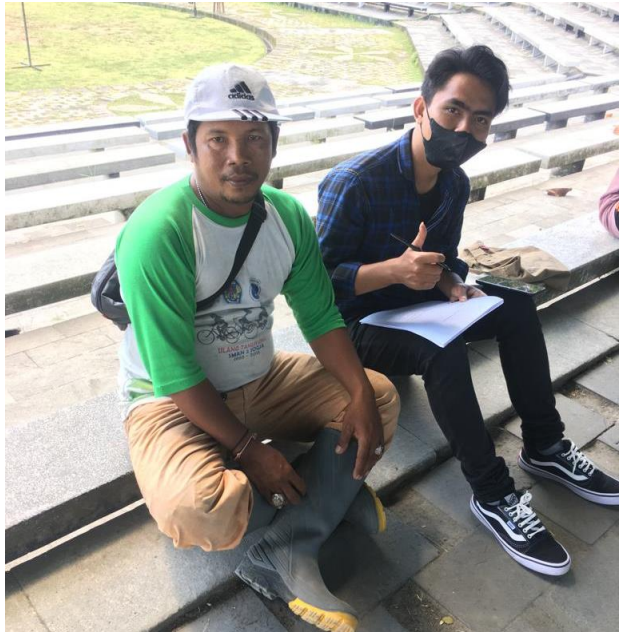
Gambar 6. foto bersama penyewa jasa jeb



Gambar 7. foto bersama pemilik kuliner di Tebing Bkresi



Gambar 8. foto bersama Humas objek wisata Tebing Breksi



Gambar 9. foto bersama petugas kebersihan



Gambar 10. foto pemandangan objek wisata Tebing Breksi



Gambar 11. foto Stan kuliner objek wisata Tebing Breksi



Gambar 12. foto mushola objek wisata Tebing Breksi



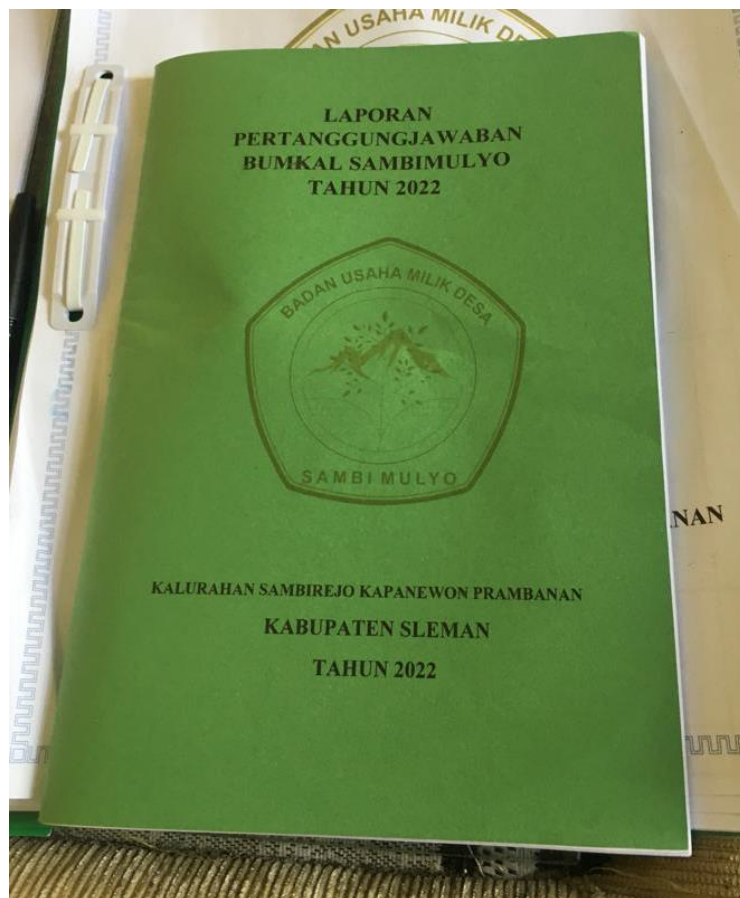
Gambar 13. foto mesin minum *selfservice*



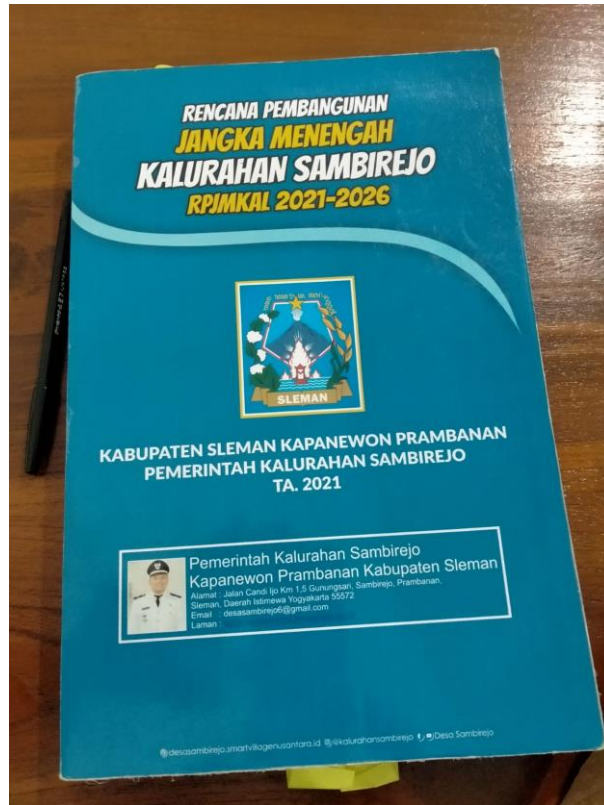
Gambar 14. Foto bersama masyarakat Bapak Surono



Gambar 15. foto bersama masyarakat Ibu Tukinem



Gambar 16. Foto LPJ BUM Kal



Gambar 17. foto RPJMKal Kalurahan Sambirejo